

346.05

PLGA

2

4

KEDUDUKAN ISTERI KEDUA DALAM HUKUM
WARIS ADAT DI PENGADILAN NEGERI
SUKOHARJO

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Derajat Magister Kenotariatan



Oleh :
NGADIMAN, SH
NIM. B 4 B 001169

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI KEDUA DALAM HUKUM
WARIS ADAT DI PENGADILAN NEGERI
SUKOHARJO**

**Disusun Oleh :
NGADIMAN, SH
NIM. B 4 B 001169**

UPT-PUSTAK-UNDIP
Nn. Daft: 2181/T/mnot/et
Vol. : 3 Feb 04

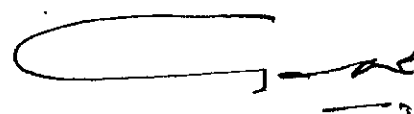
**Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 September 2003
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama,


(Hj. SRI SUDARYATMI, SH, Mhum.)

**Ketua Program
Studi Magister Kenotaritan**


(Prof. IGN. SUGANGGA, SH)

ABSTRAK

Ngadiman, SH. B 4 B 001169. 2003. **KEDUDUKAN ISTRI KEDUA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**. Tesis: Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan istri kedua dalam hukum waris adat di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan, oleh karena sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem sosial suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik. Masalahnya antara lain ada persamaan antara hukum waris adat yang dianut oleh berbagai suku atau kelompok etnik tersebut. Di antara sekian banyaknya masalah yang dapat dikaitkan dengan hukum waris adat, khusus di sini penulis akan membatasi khususnya mengenai bagaimana kedudukan istri kedua di dalam hukum waris adat yang menyangkut status wanita di Pengadilan Negeri Sukoharjo Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder. Teknik analisis datanya menggunakan metode analisa dokumenter.

Kedudukan janda dalam proses pewarisan menurut hukum ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo kedudukan istri kedua secara hukum merupakan salah satu ahli waris yang sah dari pewaris. Di lingkungan masyarakat Jawa janda akan mendapat harta warisan suami selama hidupnya atau mengalihkannya kepada anak-anaknya setelah mereka berdiri sendiri. Bahkan ada kalanya janda dalam menguasai harta warisan berperan sebagai pembagi harta warisan itu kepada para waris tanpa adanya campur tangan saudar-saudara lelaki almarhum suami. Faktor yang berpengaruh dalam penerapan kewarisan adanya fakta-fakta bahwa pada masyarakat adat yang menarik garis kekeluargaan (yang bersistem perental maupun bilateral) bahwa janda adalah ahli waris terhadap barang pencaharian bersama (gono gini) sedang untuk harta asal almarhum suaminya, janda berhak tetap pada kekuasaannya untuk dinikmati sampai janda itu meninggal dunia atau kawin lagi. Janda merupakan ahli waris almarhum suaminya, artinya tidak mewaris dari harta asal atau harta bawaan almarhum suaminya, tetapi dia berhak atas bagian dari harta pencaharian bersama (gono-gini). Janda tanpa anak dapat menguasai harta gono-gini sepenuhnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.

ABSTRACT

Ngadiman, S.H.. B 001169. 2003. **THE POSITION OF THE SECOND WIFE IN THE LAW OF CUSTOMARY HEIR AT THE COURT OF FIRST INSTANCE SUKOHARJO REGENCY.** Thesis: PostGraduate Program. Diponegoro University Semarang.

This research is aim to find out the position of the second wife in the law of customary heir at the court of first instance Sukoharjo regency.

The background of this research is that in Indonesia the law of customary heir is pluralistic based on the ethnic groups. Basically, it is because of the different system of the generation line that becomes a foundation of the ethnic groups' social system. However, the problems are that there are any similarities between the law of customary heir that is professed by the various ethnic groups. Therefore, in this research the researcher will be limited the problem in how the position of the second wife in the law of customary heir at the court of first instance Sukoharjo regency Central Java is.

This descriptive research has taken place at Sukoharjo Regency. To get the primary and secondary data, the researcher used field study and library study. For the technique of data analysis, the researcher used method of document analysis.

The position of widow in the process of inheritance based on the customary law in the Court of first instance Sukoharjo Regency that legally the position of the second wife is to be the one of the legal heirs. In the Javanese society, widow will get the husband's inheritance during her life or she can transfer it to her children after they grown up or they can be autonomous. Even sometimes the widow in dominating the inheritance has a role as the divider of those inheritance to the heirs without any intervene from her husband's brothers. The influential factor in the matters pertaining to inheritance application is that the facts that in the traditional society using generation line from both parental and bilateral system said that widow is the heir of *gono gini* (collective wealth). While for the origin wealth that come from her late husband, widow has the right to stay at her authority to enjoy her husband's wealth until she gets married again or she died. A widow that is not the heir of her late husband means that she does not inherit the origin wealth that come from her late husband, but she has the right of the collective wealth shares or *gono gini*. Widow without children can dominate the fully *gono gini* until she get married again or she died.

PERNYATAAN

Yang menyatakan di bawah ini :

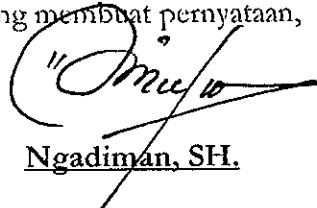
Nama : NGADIMAN, SH.

NIM : B 4 B 001169

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **"KEDUDUKAN ISTRI KEDUA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO"** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Semarang, 16 September 2003
Yang membuat pernyataan,



Ngadiman, SH.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : **“KEDUDUKAN ISTRI KEDUA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO”**

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan koreksi yang positif dari semua pihak demi sempurnanya tesis ini sangat penulis harapkan.

Dalam penulisan ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta bantuan berupa informasi dari berbagai pihak. Atas bantuan maupun bimbingan yang diberikan kepada penulis, dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. IG. Sugangga, SII., selaku Ketua Program Pascasarjana Kenotariaatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Hj. Sri Sudaryatni, SH. M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang dengan rela dan senang hati selalu memberikan petunjuk dan arahan teknis pada penyusunan laporan ini.
4. Para Bapak/Ibu Dosen Pengajar Pascasarjana Kenotariaatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah memberikan izin dan data-data yang dibutuhkan penulis.
6. Istriku tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
7. Semua pihak yang terkait dengan penyusunan Tesis ini.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua.

Surakarta, 16 September 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	7
B. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan	9
C. Putusnya Perkawinan.....	13
D. Pengertian Hukum Waris Adat.....	14
E. Azas Hukum Waris	17
F. Sistem Kewarisan	19
a. Sistem Garis Keturunan Patrilineal.....	19
b. Sistem Garis Keturunan Matrilineal.....	21

	c. Sistem Garis Keturunan Parental	22
	G. Pengertian Harta Warisan.	22
	H. Ahli Waris	23
	1. Keturunan	23
	2. Waris Janda atau Duda	26
	I. Proses Pewarisan	30
	1. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia	31
	2. Sudah Pewaris Meninggal Dunia	32
	J. Yuriprodensi Waris Adat Tentang Janda	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian.....	42
	B. Jenis Penelitian.....	42
	C. Populasi dan Sampling	42
	D. Teknik Pengumpulan Data	43
	E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kedudukan Istri Kedua Dalam Hukum Waris Adat di Pengadilan Negeri Sukoharjo	45
	B. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Kewarisan.....	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas sumber tertib hukum negara, yaitu cita-cita yang terkandung dalam pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kewajiban serta watak bangsa Indonesia yang tersirat dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu, maka tidaklah dapat dipungkiri lagi bahwa posisi serta peranan hukum adat merupakan suatu hukum yang berakar dari kebudayaan rakyat. Oleh karena itu selalu mengikuti serta mencerminkan jiwa, cara dan pandangan hidup dari masyarakat tersebut. Sangatlah benar jika Van Savigny mengatakan bahwa hukum itu mengikuti Volkgeist dari masyarakat tempat hukum itu berlaku ¹⁾.

Begitu pula halnya dengan Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa "... hukum dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelma "*Geestructuur*" dari masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yaitu hukum dari masyarakat masing-masing berlainan ²⁾.

¹⁾ Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta. 1978. Hal 49.

²⁾ Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Penerbit Alumni. Bandung. 1979. Hal 83

Tingkat peradaban yang modern maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu biasanya adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga adat itu tetap hidup. Tegasnya Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa : "... tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamintil yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru, sebab masyarakat adalah sesuatu yang berjalan terus/tidak berhenti. Masyarakat berubah tetapi tidak sekaligus meninggalkan yang lama. Jadi dalam masyarakat terdapatlah realitas bahwa suatu proses perkembangan mengatur kembali yang lama serta menghasilkan syntesa dari yang lama dan yang sesuai dengan kehendak, kebutuhan, cara hidup dan pandangan hidup rakyat ³⁾.

Demikian halnya dengan masalah kedudukan istri kedua dari suami yang berpoligami. Dalam sistem hukum waris adat, pada prinsipnya janda tidaklah dipandang sebagai ahli waris, melainkan sebagai anggota keluarga yang perlu mendapat perlindungan kehidupan setelah ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, janda mempunyai hak pakai seumur hidup sepanjang mereka tidak kawin lagi. Hak itu menyebabkan harta peninggalan tidak atau belum dibagi selama janda masih hidup ⁴⁾.

³⁾ *Ibid.* Hal 3.

⁴⁾ HR. Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Penerbit Alumni Bandung. 2002. Hal 85.

Dalam kenyataannya, hak tersebut sering menimbulkan sengketa karena janda tidak memandangnya sebagai hak pakai, tetapi menjadi hak milik. Fakta tersebut mengakibatkan berkembangnya hukum waris adat, dalam arti terjadi pergeseran kedudukan janda menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan suami.

Khusus mengenai harta bersama seorang suami yang berpoligami, menurut Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dimungkinkan adanya percampuran antara harta bersama suami dengan istri pertamanya dengan harta bersama suami dengan istri keduanya, artinya harta bersama tersebut diurus oleh masing-masing secara terpisah atau dengan kata lain si suami memiliki dua kelompok harta bersama.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. pada dasarnya hal itu disebabkan, oleh karena sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem sosial suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik. Masalahnya antara lain ada persamaan antara hukum waris adat yang dianut oleh berbagai suku atau kelompok etnik tersebut.

Di antara sekian banyaknya masalah yang dapat dikaitkan dengan hukum waris adat khusus disini penulis akan membatasi khususnya mengenai bagaimana kedudukan istri kedua di dalam hukum waris adat yang menyangkut status wanita

di Pengadilan Negeri Sukoharjo Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.

Berdasar asumsi diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang kedudukan janda dalam pewarisan dengan judul : **KEDUDUKAN ISTERI KEDUA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

B. Permasalahan

Berpijak dari latar belakang di atas, maka dikemukakan permasalahan yang akan diangkat sebagai pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan isteri kedua dalam hukum waris adat di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?.
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap penerapan kewarisan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penelitian yang diadakan pasti mempunyai tujuan tertentu, sesuai dengan obyek yang diteliti. Begitu pula dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan isteri kedua dalam hukum waris adat di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan kewarisan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis akan menguraikan, baik itu kegunaan yang sifatnya khusus maupun yang sifatnya umum adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kedudukan isteri kedua dalam hukum waris adat.

2. Aspek Akademik

Dengan penelitian ini berguna sekali sebagai kajian ilmiah untuk para calon notaris terhadap telaah masalah yang timbul dalam kedudukan isteri kedua secara hukum terhadap hak dan kewenangannya atas harta waris peninggalan almarhum suaminya menurut hukum adat.

E. Sistematika Penulisan

Agar supaya penulisa tesis ini dapat diikuti penalarannya, maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN, bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini disajikan kajian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini

yaitu, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya mengenai sahnyanya perkawinan, beristri lebih dari seorang, dan putusnya perkawinan. Kedudukan wanita dalam perkawinan di antaranya menguraikan tentang hakikat perkawinan, tujuan-tujuan khusus perkawinan, dan pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Kedudukan janda dalam hukum waris adat dan sistem garis keturunan, diantaranya menguraikan tentang belum ada unifikasi dalam hukum waris di Indonesia, pengertian harta warisan, siapa-siapa yang berhak mewaris, kedudukan janda secara umum, sistem garis keturunan patrilineal, sistem garis keturunan matrilineal dan sistem garis keturunan parental. BAB III. METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis dalam meneliti selalu berpatokan dan sejalan dengan sistem metodologi yang ada. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan istri dalam hukum waris adat di pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan kewenangan hukum yang dimiliki istri kedua untuk menguasai harta warisan peninggalan almarhum suaminya. BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dsekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting/ membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Malah dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga

merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap. Hubungan suami istri setelah perkawinan bukan merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu peguyuban⁵⁾. Peguyuban ini oleh Djojodigono disebut peguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Peguyuban hidup tersebut lazim disebut somah dan dalam somah itu hubungan antara suami dan istri itu adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan satu ketunggalan.

Bahwa setelah perkawinan suami istri itu merupakan satu ketunggalan adalah terbukti antara lain karena :

- a. Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka masing-masing pakai hingga saat itu serta kemudian memperoleh nama baru yang selanjutnya mereka pakai bersama.
- b. Sesebutan yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami istri, yaitu garwa. Istilah berasal dari kata-kata sigaraning nyawa. Jadi jelas dari

⁵⁾ Djojodigono dalam bukunya *Asas-asas Hukum Adat*, Hal 54.

sesebutan tersebut di atas, nyata sekali pandangan orang Jawa bahwa suami istri itu merupakan satu ketunggalan.

- c. Ada ketunggalan harta dalam perkawinan yang disebut harta gini ⁶⁾.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangka kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

B. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Menurut penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangka kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan

⁶⁾ *Ibid*, Hal 54.

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- 3) Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu didiputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam pernghidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Menurut Subekti, syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan, ialah :

- a) kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun.
- b) Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
- c) Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudah putusnya perkawinan pertama.
- d) Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak.
- e) Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya ⁷⁾.

Pada dasarnya Hukum Perkawinan Nasional adalah monogami, ini dengan tegas disebut dalam pasal 3 ayat (1) yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi pembuat Undang-undang masih menghayati keadaan yang nyata dalam perkawinan, sehingga pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memberi kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang apabila agama dan

⁷⁾ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Ctk XXI. Jakarta. 1987. Hal 24.

kepercayaannya memungkinkan. Sehingga di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Perkawinan Nasional menganut asas monogami yang tidak mutlak. Adapun alasan-alasan yang diberikan untuk membenarkan poligami, kaum wanita pada umumnya tidak dapat menerima dengan ikhlas. Untuk itu Undang-undang memberikan syarat-syarat yang ketat mengenai orang yang ingin poligami. Seorang suami yang akan beristri lagi lebih dari satu, maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan (pasal 40 Peraturan Pemerintah), dengan syarat-syarat seperti yang tersebut dalam pasal 5 Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin segala keperluan hidup istri dan anak-anak.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang bersifat kumulatif, artinya bahwa ketiga syarat tersebut harus dipenuhi. Adapun alasan yang diajukan oleh Pengadilan dalam memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang adalah seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang diulang kembali dalam pasal 41 sub a Peraturan Pemerintah, yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan tersebut adalah alasan yang bersifat alternatif artinya bahwa cukup salah satu diantara ketiga syarat itu dipenuhi. Betapa beratnya syarat-syarat yang disebutkan atau dibebankan oleh Undang-undang kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Bila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka seorang laki-laki tidak mungkin akan beristri lebih dari seorang meskipun wanita yang akan dinikahi telah hamil, sehingga bila wanita tersebut telah melahirkan anak maka anak yang lahir itu akan menjadi anak di luar nikah

C. Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 putusnya perkawinan dapat dikarenakan oleh (1) kematian, (2) perceraian dan (3) atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup tukun sebagaimana suami istri. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41) :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

D. Pengertian Hukum Waris Adat

Dalam hukum adat Jawa terdapat beberapa bidang kehidupan yang diatur oleh hukum adat tersebut. Salah satu bidang yang diatur oleh hukum adat yaitu hukum waris atau hukum waris adat. Hukum waris yang merupakan peninggalan dari nenek moyang, yang secara turun temurun diteruskan oleh para diteruskan oleh para keturunannya. Dimana antara masyarakat adat Jawa yang satu dengan adat Jawa yang lain mempunyai kebiasaan yang yang tidak sama tentang ketentuan hukum waris adatnya. Dengan adanya proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan peristiwa penting. Dengan

demikian diperlukan norma-norma yang menetapkan atau mengatur proses, saat dan cara peralihan tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan hukum tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Ter Haar menyatakan :

... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.⁸⁾

Soepomo menyatakan :

Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu berwujud benda (*generatie*) kepada turunannya⁹⁾.

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan

⁸⁾ Ter Haar Bzn. Mr.B. *Begenselen en stelsel van het adatrecht*. JB. Wolters Groningen Djakarta. 4e druk. 1950. Alih bahasa RB. Soedjono, Hal. 197.

⁹⁾ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Penerbit Universitas. 1967. Hal 72.

harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono :

... Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup ¹⁰⁾.

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Cara penyelesaian itu bukan diartikan dari kematian seorang, sedangkan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUHPerdara. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat (Jawa, lintiran) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang

¹⁰⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Cetakan ke lima. Sumur. Bandung. 1976. Hal 8.

berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berasas kekeluargaan di mana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam pikiran bangsa Indonesia.

E. Azas Hukum Waris

Pada asasnya menurut hukum adat Jawa janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya ¹¹⁾. Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan maka janda atau duda berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepada waris.

¹¹⁾ Soedarso, *Hukum Adat Waris*. Madjalah Hukum Adat Th II/1-2, YP. Hukum Adat Yogyakarta. 1961. Hal 53.

Asas-asas dalam hukum waris adat bangsa Indonesia adalah asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari ¹²⁾ :

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri;
- b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak;
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan;
- d. Asas musyawarah dan mufakat;
- e. Asas keadilan dan parimirma.

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, itupun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti didalam ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat. Dengan kesimpulan bahwa asas-asas yang berdasarkan Pancasila itu adalah asas-asas umum didalam hukum adat.

Dengan jalur adat maka ia berkemanusiaan yang adil dan beradab untuk kesamaan hak dan atau kebersamaan hak. Ia patut menjaga persatuan kekeluargaan, kekerabatan atau ketetanggan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan welas kasih terhadap sesama oleh sesama.

¹²⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung. 1999. Hal 21.

Hukum waris adat memperlihatkan atau menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia, serta sangat berkaitan dengan sifat-sifat tertib kekeluargaan dan mempunyai pengaruh terhadap cara-cara pewarisan harta peninggalan suatu keluarga.

Harta waris adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hukum waris adat mempunyai keistimewaan sendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan, atau beralih maupun dioperkan kepada yang berhak menerimanya berdasar hukum, pada waktu pewaris masih hidup dan pada umumnya ketika pewaris sudah tua. Itulah sebabnya harta benda dalam hukum waris adat tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi disesuaikan dengan kepantasan dan kepatutan barang tersebut untuk ahli waris.

Menurut Hukum waris adat Jawa umumnya, harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus

dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan dalam kerukunan kekerabatan¹³⁾.

Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris.. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

F. Sistem Kewarisan

a. Sistem Garis Keturunan Patrilineal

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.

¹³⁾ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1987. Hal 78.

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluarganya patrilineal adalah perkawinan dengan jujur. Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara sekandungnya dengan kata lain dengan kerabatnya dan persekutuanannya. Setelah perkawinan si istri masuk sama sekali dalam lingkungan kekeluargaan suaminya, begitu juga anak-anak keturunan dari perkawinan itu.

Masalah jujur ini didaerah Tapanuli disebut juga jujuran, perujuk, unjung, sinamot, pangoli, boli dan tuhor. Ter Haar dalam bukunya "*Beginnelsen en stelsel van het adarecht*" perkawinan dengan jujur serta jujurnya oleh pihak laki-laki diberikan kontan menjelang perkawinan. Tetapi, di samping jujur dibayar secara kontan ini, terdapat juga kebiasaan yang jujurnya itu baru dibayar dikemudian hari, bahkan malahan ada kebiasaan yang jujurnya itu tidak dibayar sama sekali.

Dalam perkawinan yang jujurnya baru dibayar dikemudian hari ini, hubungan antara menantu (laki-laki) dan keluarga istri (mertua) seperti buruh dan majikan, sebab selama si menantu belum dapat membayar jujur itu, ia harus memberikan jasanya lebih dahulu kepada keluarga mertuanya serta ia tidak masuk dalam keluarga istrinya. Anak-anak yang lahir selama masa itu masuk dalam keluarga istrinya. Akan tetapi, apabila kemudian jujur itu

dibayar, maka anak-anak setelah pembayaran tersebut masuk dalam keluarga laki-laki.

Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal ini kiranya perlu juga diketengahkan perkawinan seorang janda, yang setelah suaminya meninggal dunia tetap berdiam dalam lingkungan keluarga suaminya dengan saudara muda almarhum suaminya jadi seolah-olah seorang istri itu diwaris oleh adik almarhum suaminya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro corak perkawinan semacam ini dalam susunan kekeluargaan patrilineal dapat dianggap sebagai lanjutan dari pembayaran jujur (sifat jual beli) pada perkawinan yaitu apabila dianggap, bahwa yang beli si istri semula itu, bukanlah suaminya semata-mata melainkan keluarga si suami ¹²⁾.

b. Sistem Garis Keturunan Matrilineal

Sistem matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.

Dalam keluarga matrilineal tidak ada pembayaran jujur. Setelah kawin suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai "*urang sumando*". Pada saat perkawinan mempelai laki-laki dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk kemudian

¹²⁾ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cetakan ke 2. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal 52.

dibawa ke rumah bakal istrinya. Upacara pada penjemputan ini disebut "*alar melepas mempelai*".

Suami seterusnya turut berdiam di rumah istrinya atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk keluarga si istri seperti di atas telah ditegaskan (tetap masuk keluarganya sendiri), tetapi anak-anaknya masuk keluarga istrinya, masuk warga kerabat istrinya masuk clan istrinya dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri.

e. Sistem Garis Keturunan Parental

Sistem parental yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

Setelah perkawinan di sini si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental ini, sebagai akibat perkawinan adalah, bahwa suami dan istri masing-masing menjadi mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di lain pihak. Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya.

Dalam susunan kekeluargaan parental terdapat juga kebiasaan pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tetapi

pemberian-pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur mungkin dahulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak mempunyai arti sebagai hadiah perkawinan.

G. Pengertian Harta Warisan

Suatu asas yang sangat umum berlakunya daripada hukum adat Indonesia ialah bahwa mengenai hartanya, kerabatnya sendiri yang berasal dari warisan atau hibahan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah seorang dari suami istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan barang-barang itu kepadanya. Harta serupa itu disebut *pimbit* (Dayak, Ngaju), *sisila* (Mak), *babaktan* (Bal), asal, asli, pusaka (Jawa, Indonesia) dan sebagainya. Bila terjadi perputusan perkawinan karena perceraian maka harta itu tetap mengikuti si suami atau si istri yang memilikinya semula, dan sesudah matinya si pemilik maka harta itu tidak pindah tangan di luar kerabatnya, artinya tidak jatuh sebagai harta warisan ke tangan seorang dari pada suami istri yang masih hidup dan barang kali di Jawa oleh karena itu juga tidak diwaris oleh anak-anak angkat, agar supaya barang-barang itu jangan sampai hilang.

Di Minangkabau harta benda kerabat tidak mungkin dapat dihibahkan dan tidak dapat diwaris oleh anggota kerabat orang seorang. Dalam soal ini maka disana keluarga atau cabang kerabat tidak begitu tertampak tampil dimuka, ialah karena mereka mempunyai hak pakai atas harta benda kerabat, yaitu mereka mempunyai *ganggam bauntiug* atas harta pusaka sama dengan hak keluarga atas

barang-barang pusaka di Ambon. Akan tetapi hampir semua tempat-tempat lainnya harta benda kerabat yang sudah dijadikan harta benda keluarga itu nampak terpisah lebih terang. Harta yang diikutkan kepada pengantin perempuan sebagai bekal dalam susunan ber hukum, terkadang tetap menjadi miliknya si istri dan diwaris oleh suaminya, walaupun bila terjadi perceraian barang-barang itu dibawanya kembali ke kerabat tempat asalnya.

H. Ahli Waris

Keluarga sedarah pewaris menurut B.W disusun dalam kelompok, yang disebut dengan nama golongan ahli waris, terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Anak luar kawin yang diakui secara sah tidak termasuk dalam salah satu golongan tersebut, tetapi merupakan kelompok tersendiri. Prinsipnya, kalau masih ada ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup untuk mewaris. Di dalam tiap-tiap atau masing-masing golongan, ahli waris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup yang lebih jauh, tetapi dengan mengindahkan adanya asas penggantian tempat.

1. Keturunan

a. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh

perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan ayah ibu sianak sah, maka anaknya sah sebagai waris, sebaliknya jika perkawinan ayah ibu sianak tidak sah, atau anak lahir diluar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai waris dari orang tua kandungnya. Namun demikian di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai waris dari orang tuanya. Disamping itu terdapat pula perbedaan antara anak lelaki dan anak perempuan dalam pewarisan, atau juga anak sulung, anak tengah dan anak bungsu. Tetapi betapapun perbedaannya namun pada umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.

Pertama, diberbagai golongan masyarakat yang dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama, sebagaimana dimasa sekarang sudah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyatakan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dan Pasal 2 ayat (1) menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi anak yang lahir dari perkawinan tidak menurut hukum agama pada dasarnya tidak berhak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya. Sedangkan anak yang sah baik anak lelaki maupun perempuan pada dasarnya adalah waris dari orang tua yang melahirkannya.

Kedua, anak tidak sah sering disebut dengan istilah setempat anak ketampang, anak haram jadah, anak kowar dan sebagainya. Anak tidak sah

yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama. Anak yang tidak sah ini menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut Undang-undang anak-anak tidak sah itu dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya, dan belum tentu dapat pula sebagai waris dari ayah biologisnya.

Ketiga, anak lelaki sebagai waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan, dimana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak lelaki dari saudara kandungnya lelaki yang terdekat, demikian seterusnya sehingga hanya anak lelaki yang menjadi waris, dimana segala sesuatunya harus didasarkan atau musyawarah dan mufakat para anggota kerabat.

Keempat, kedudukan anak lelaki dan anak perempuan sebagai waris yang berhak sama atas harta warisan orang tuanya berlaku dikalangan masyarakat dengan sistem kekeluargaan. Apa yang dimaksud semua anak lelaki dan anak perempuan adalah sama haknya atas harta warisan tidak berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi merata diantara semua waris, oleh karena itu warisan tidak merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang. Begitupula bagaimana pembagian itu kelak akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan warisnya, ada kemungkinan waris yang lemah ekonominya mendapat lebih banyak dari waris yang kuat ekonominya.

b. Anak tiri dan anak angkat

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami isteri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan didalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak, kemudian si anak dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Pada dasarnya anak tiri bukan waris dari ayah tiri atau ibu tiri, tetapi ia adalah waris dari ayah-ibu kandungnya sendiri.

2. Waris Balu, Janda Atau Duda

Istilah balu diberbagai daerah berarti pria atau wanita yang kematian istri atau kematian suami, jadi bukan sekedar duda atau janda kerana perceraian hidup. Di dalam uraian dibawah ini kita pakai istilah janda dalam arti wanita balu dan duda dalam arti pria balu. Masalahnya apakah janda atau duda itu karena wafat salah satu teman hidupnya (cerai mati) mendapat warisan dari almarhum, atau hanya sekedar menikmati atau mengurus harta itu saja dan sebagainya.

Sesungguhnya kedudukan balu sebagai waris atau bukan waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat bersangkutan dan berbentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka. Ada balu setelah teman hidupnya wafat, maka ia tetap tidak bebas untuk menentukan sikap tindaknya oleh karena ia masih tetap harus berkedudukan ditempat pihak kerabat suami hidupnya wafat ia dapat kembali pada kerabat asalnya dan atau bebas menentukan sikap tindaknya untuk kawin lagi atau tidak kawin lagi.

Dilingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal atau matrilineal tidak banyak mengundang permasalahan waris, kecuali pada keluarga-keluarga yang taat pada hukum waris Islam, maka dalam kekeluargaan parental yang terbanyak di Indonesia, masalahnya menyangkut kedudukan balu, terutama mengenai janda apakah ia dapat mewarisi suami yang wafat ataukah hanya berhak menguasai dan menikmati warisan itu saja. Hal ini dapat diketahui dari jurisprudensi atau hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap keluarga-keluarga orang Jawa.

Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua maupun muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat, tetapi juga dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris. Sikap tindak demikian tidak terdapat dalam sistem pewarisan kolektif mayorat.

Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para warisnya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu berselang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan penangguhan waktu dikarenakan diantara waris ada yang belum hadir atau karena diantara waris ada yang masih dibawah umur atau karena masih ada orang tua yang dapat mengurus harta warisan itu. Dikalangan orang Jawa biasanya adanya pembagian warisan apabila sudah ada

anak-anak yang sudah dewasa dan hidup mencar atau dikarenakan si pewaris tidak punya keturunan.

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat adat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh janda atau balu berserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda atau balu itu tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ia akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini punya hak untuk diajak berembug (berunding) mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut¹⁵⁾.

I. Proses Pewarisan

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan merupakan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal.

Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukkan dan atau dengan cara berpesan,

¹⁵⁾ Soedarso, *Op. Cit.* Hal. 73.

berwasiat, beramanat. Ketika pewaris telah meninggal berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.

1. Sebelum pewaris wafat

Pada saat pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban serta harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebapakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuan, kepada anak tertua lelaki atau anak tertua perempuan menurut garis keibu-bapak-an.

Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada waris yang sudah seharusnya berlaku menurut hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan, hak dan kewajiban serta harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak lelaki tertua atau termuda. Dalam penerusan atau pengalihan harta kekayaan di kala pewaris masih hidup ialah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru.

Apabila penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan, itu berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada waris, maka dengan perbuatan penunjukan oleh pewaris kepada waris atas hak dan harta tertentu, maka berpindahnya

penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat.

Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Oleh karena apabila keadaan mendesak disebabkan adanya kebutuhan luar biasa yang perlu diatasi, misalnya untuk biaya sakit anggota keluarga dan sebagainya, pewaris masih dapat merubah maksudnya itu atau mentransaksikan harta itu kepada orang lain. Tentu saja diperlukan adanya pembicaraan atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Jadi seorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati.

2. Sesudah Pewaris Wafat

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para waris atau tidak akan dibagi-bagi. Jika harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika ia dibagi-bagi maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian itu dilaksanakan.

Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris, atau karena pembagiannya ditangguhkan disebabkan alasan-alasan. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dapat

dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan. Barangsiapa menjadi penguasa atas harta warisan berarti bertanggungjawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris ketika hidupnya dan pengurusan para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para waris.

Pada umumnya pembagian warisan tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kaapan sebaliknya diadakan pembagian, begitupula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut waktu tujuh hari, waktu empat puluh hari, nyeratus hari atau waktu seribu hari setelah pewaris wafat, oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.

Selama pembagian warisan itu berjalan baik, rukun dan damai diantara para waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga bersangkutan. Campur tangan dan kesaksian tua-tua adat atau para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi tidak lancar.

Cara pembagian warisan didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan. Dikalangan masyarakat Jawa cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu :

- 1) dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat dari bagian anak perempuan; atau
- 2) dengan cara dum-dum kupat, artinya bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan berimbang sama.

J. Yurisprudensi Waris Adat Tentang Janda

Di dalam keluarga, atau lebih tepat di dalam rumah tangga suami istri, istri itu, jikalau suaminya telah meninggal dunia, mempunyai kedudukan istimewa, oleh sebab jikalau misalnya anak-anaknya telah mencar semua, istri sebagai janda tinggal sendiri di dalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya dan berhak tetap tinggal dirumah tangga itu dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan, jikalau ia memerlukannya dan selama ia memerlukannya untuk kehidupannya.

Jika di lihat dalam yurisprudensi atau dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat adat Jawa maka nampak adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kenyataan mengenai kedudukan janda dalam pewarisan harta peninggalan suami yang telah wafat. Yurisprudensi sebelum kemerdekaan negara Republik Inodesia lebih banyak berpendapat bahwa janda bukan waris dari almarhum suaminya, sedangkan yurisprudensi setelah kemerdekaan cenderung berpendapat bahwa janda adalah waris dari suaminya. Yurisprudensi yang dapat dikaji untuk masalah tersebut sebagai berikut :

1. Menurut keputusan Raad van Justitie Batavia tanggal 26 Mei 1939 dikatakan bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari peninggalan suami, jika ternyata harta gono gini tidak mencukup. Kemudian keputusan Raad van Justitie Batavia tanggal 17 November 1939 (T. 153-148), tanggal 24 November 1939 (T. 152-140) dan tanggal 26 November 1939 (T. 151-193) berpendapat bahwa pada hakekatnya janda bukan ahli waris terhadap harta warisan almarhum suaminya.
2. Tetapi menurut keputusan Landraad di Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 (T. 148-299) menyatakan bahwa barang pencaharian dan barang gono gini jatuh kepada janda dan anak angkat sedangkan barang asal kemudian kepada saudara yang meninggalkan warisan, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri. Keputusan tersebut bersamaan dengan keputusan Mahkamah Agung Tanggal 5 Maret 1959.
3. Kemudian Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1959 No. 387 K/Sip/1958 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapat separoh dari harta gono gini dan keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 No. 298 Kara/Sip/1958 dikatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak pun, maka istri janda dapat tetap

menguasai barang-barang gono gini sampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi.

4. Keputusan makamah Agung 140.K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggalkan seorang anak angkat dan dua orang janda dibagi masing-masing sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta warisan tersebut.

Menurut pandangan Subekti, maka pendapat demikian itu adalah menurut doktrin dahulu dimana seorang janda dalam hukum adat adalah bukan ahli waris tetapi berhak untuk dijamin kehidupannya dari warisan sang suami, sekarang oleh Pengadilan janda tersebut sudah lazim diberikan predikat ahli waris juga. Subekti melanjutkan bahwa tendensi untuk menjadikan si janda ahli waris dari almarhum suaminya di mulai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1957 No. 130 K/Sip/1957 dalam soal penetapan ahli waris atas permohonan anak-anak almarhum, dimana Mahkamah Agung untuk menghilangkan kesan seolah-olah janda tidak berhak atas warisan suaminya kalau dalam putusan declaratoir itu adalah janda dari almarhum, telah memutuskan untuk menyatakan bahwa anak-anak dan ibu adalah sama-sama berhak atas warisan almarhum ¹⁶⁾.

Dapat disimpulkan bahwa janda perempuan mendapat bagian yang sama dengan bagian anak keturunan si wafat. Selanjutnya begitu pula dengan hasil

¹⁶⁾ Subekti, *Penerapan Hukum Adat Dalam Praktek Peradilan*, Laporan Penataran Fakultas Hukum. UGM Yogyakarta. 1978.

penelitian Gondokusumo dan Emanuels pada tahun 1938 (T. 149137) berkesimpulan bahwa janda adalah ahli waris suami ¹⁷⁾.

Janda menurut putusan peradilan sebelum kemerdekaan, tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan si suami, jika ternyata, bahwa harta gono gini tidak mencukupi. Janda berhak untuk terus hidup sedapat-dapatnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan.

Harga benda keluarga, yaitu rumah tangga suami istri, terdiri dari barang asal si suami, barang asal si istri dan barang gono gini. Dalam kehidupan sehari-hari amat banyak ragam yang diturut dalam hal pembagian dan pemakaian harta peninggalan. Misalnya apabila ada janda dan anak-anak yang telah dewasa, maka :

- 1) Harta peninggalan (barang asal dari pihak suami, barang asal dari pihak istri dan barang gono gini) dibagi-bagi antara semua anak. Si janda (ibu) berdiam pada salah seorang anaknya dan dipelihara oleh semua anak atau cukup oleh anak yang ditumpangnya. Janda tidak mendapat bagian sedikitpun dari harta peninggalan tersebut, juga tidak dari barang saslnya sendiri dan juga tidak menuntut untuk mendapat bagian, oleh sebab kehidupannya telah terjamin.
- 2) Mungkin pula si janda mendapat sebagian harta peninggalan, misalnya sebuah rumah dan sebidang sawah, mungkin barang yang dibagikan kepada janda itu kebetulan masuk golongan barang asal suami, sedang barang-barang lainnya dibagi-bagi antara anak-anak.

¹⁷⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* Hal 33.

- 3) Kemungkinan lain, ialah bahwa suami telah mewariskan sebidang sawah yang masuk golongan barang asal suami sendiri, dan sebuah rumah yang masuk golongan barang gono gini, kepada istri, sehingga suami itu meninggal, sisa dari harta peninggalannya dibagi-bagi antara anak-anak.

Asas unifikasi yang dimaksudkan ialah dalam arti memberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk kesatuan hukum, tapi tetap membuka kesempatan untuk terbentuknya kekuatan-kekuatan tersendiri. Ketentuan ini seyogyanya dirumuskan dalam kalimat yang bersifat umum dan dapat dipergunakan oleh banyak pihak, serta tidak ditujukan secara khusus bagi sesuatu golongan saja¹⁸⁾. Sebagai contoh yang dapat digunakan, asas tersebut telah berhasil seperlunya diterapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada yang menyebutkan asas demikian itu dengan pola unifikasi yang mengandung unsur differensiasi.

Tiap hukum merupakan suatu sistem, artinya kompleks norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pengejawantahan dari pada kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia.

¹⁸⁾ Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit : Univertsitas Diponegoro, Semarang Hal 78.

Menyimpang ataupun lebih tepat berlainan dengan hukum barat yang individualistis leberalistis sifatnya itu, hukum adat memiliki corak-corat sebagai berikut ¹⁹⁾:

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- 2) Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- 3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhetikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit.
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Corak-corak khas dimaksud di atas nampak pula dengan jelas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat komunal, sifat kebersamaan atau *komune trek* terlihat dalam warga desa melakukan kerja gugur gunung nampak pola dalam kebiasaan hidup tolong menolong, bantu membantu. Bahkan pada suku bangsa Jawa terdapat suatu pepatah adat yang melukiskan secara tepat

¹⁹⁾ Soepomo dalam *Sistem Hukum di Indonesia*, Hal 116-117

sekali sifat komunal ini, yaitu pepatah yang berbunyi *dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kelangan*.

Corak religio magis terlihat dengan jelas sekali pada upacara-upacara ada dimana lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu serta bantuannya. Pikiran penataan serba konkrit dalam realitas kehidupan sehari-hari menyebabkan satunya perkataan dengan perbuatan. Sifat visual atau kelihatan ini menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari adanya selalu pemberian tanda-tanda yang kelihatan untuk bukti penegasan atau peneguhan daripada apa yang telah dilakukan atau yang dalam waktu dekat akan dilakukan. Misalnya sebagai contoh : pemberian paningset (Jawa), panyancang (Periangan) merupakan penegasan dari pertunangan yang telah dilakukan atau pemberian panjer pada transaksi jual-beli merupakan penegasan terhadap kehendak pembelian yang dalam waktu dekat akan dilakukan.

Sudah sejak lama bidang hukum waris dipandang sebagai bidang hukum yang peka dan sensitif dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga pada umumnya selalu dianjurkan agar kita berhati-hati bila mana ingin memperbincangkan persoalan hukum waris ini, mengingat hukum waris bukan hanya merupakan persoalan yang semata-mata mengenai harta benda saja, akan tetapi menyangkut aspek yang bertali temali dengan persoalan sosial ekonomi dan budaya bangsa, bahkan juga bertalian erat sekali dengan hukum agama. Berbagai faktor yang

menyebabkan unifikasi di bidang hukum sulit untuk dilaksanakan, antara lain karena kebiasaan atau tradisi dan agama dari berbagai golongan didalam masyarakat masih teguh. Namun betapapun banyaknya faktor-faktor penghambat kiranya tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan usaha pembinaan ke arah hukum waris nasional ²⁰⁾.

²⁰⁾ Sunaryati, 1989, *Hasil Diskusi Tentang Hukum Waris Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Hal iii.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul kedudukan hukum isteri kedua dalam hukum waris adat di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian normatif, untuk mengetahui legalitas tentang kedudukan istri (istri kedua perkawinan kedua) dalam hubungannya dengan harta waris almarhum suaminya menurut hukum waris adat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin pada saat sekarang tentang kedudukan hukum isteri kedua dalam hukum waris adat di Kabupaten Sukoharjo.

C. Populasi dan Sampling

Menurut Suharsimi Arikunto untuk menentukan populasi dan sampel dalam suatu penelitian tidaklah selalu meneliti seluruh individu dalam populasi ²⁰⁾.

²⁰⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hal 52.

Dari jumlah perkara harta warisan yang ditangani Pengadilan Negeri Sukoharjo selama tahun 2002 sebanyak 12 kasus tentang waris, sedangkan pembagian harta warisan yang menjadi hak isteri kedua menurut hukum adat hanya ada satu kasus.

Sebagai responden dalam penelitian ini dapat ditentukan :

1. Para pihak yang secara langsung berperkara dalam hal waris.
2. Hakim yang menangani perkara waris yang menjadi hak isteri kedua menurut hukum adat di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis. Untuk mendapatkan data primer, maka digunakan teknik pengumpulan data adalah dengan *Library Research* (Studi Pustaka).

Untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan cara mencari, menginventasi dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Sebagai bandingan diperlukan data-data dokumentasi dari Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam hubungannya dengan pewarisan terhadap istri kedua (isteri kedua) sebagai pewaris sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dokumenter. Pengertian analisa dokumenter adalah cara pemilihan yang menghasilkan data-data dari bahan kepustakaan atau dokumen, yakni apa yang diperoleh peneliti dari dokumen yang dipelajari dicatat dan dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan. Kenyataan yang ada dalam dokumentasi dipelajari secara utuh ²¹⁾.

Penulis memperoleh data-data dari kepustakaan, kemudian dikumpulkan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dalam hal ini digunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif dimaksudkan bahwa semua data-data yang diperoleh dikaji secara intensif dengan mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan kajian berikutnya mempertimbangkan metode deduktif, artinya hal-hal yang ditemukan dalam analisa dipertimbangkan dari hal-hal yang bersifat khusus pada data-data kajian yang bersifat umum.

Langkah berikutnya dicari hubungan dengan data penelitian kepustakaan yakni peraturan perundangan dan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah kedudukan istri kedua pada perkawinan kedua, sehingga diperoleh gambaran secara jelas tentang perlindungan hukum terhadap isteri kedua dalam pembagian harta warisan berdasar hukum waris adat di Kabupaten Sukoharjo.

²¹⁾ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Isteri Kedua Dalam Hukum Waris Adat di Pengadilan Negeri

Sukoharjo

Di dalam rumah tangga suami isteri, isteri itu setelah suaminya meninggal dunia, mempunyai kedudukan yang khusus. Kalau yang dijadikan syarat bagi waris itu tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka sudah jelas sekali bahwa seorang janda itu tidak mungkin merupakan waris dari suaminya. Tetapi ada kenyataan juga bahwa dalam suatu perkawinan itu, hubungan baik lahir maupun bathin antara suami dengan isterinya itu dapat sedemikian eratnya, sehingga jauh melebihi hubungan antara suami dengan saudara sekandung misalnya. Realitas inilah yang menyebabkan seorang janda itu dirasa adil apabila dalam hal warisan khususnya diberi kedudukan yang istimewa dan pantas disamping kedudukan anak-anak sipeninggal warisan.

Di Pulau Jawa, dimana terdapat adanya dua macam sifat hubungan kekeluargaan, sudah barang tentu kedudukan seorang janda itu di masing-masing macam sifat hubungan kekeluargaan tidak sama. Di Pulau Jawa dengan sifat kekeluargaan, *pertama*, sepanjang perkawinan dengan jujur itu masih dianggap sebagai suatu peristiwa dengan tidak memutuskan pertalian hubungan si isteri dari familynya sendiri serta kemudian memasukkan si isteri itu dalam pertalian

hubungan family sang suami yang meninggal dan dengan demikian nasib si janda tidak akan terlantar serta akan tetap menikmati barang-barang peninggalan suaminya.

Selanjutnya menurut hukum adat Jawa pada perjalanan zaman pada waktu sekarang ternyata terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Si janda dapat mewarisi harta pencaharian sang suami yang meninggal dunia.
- b. Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampunan ibu.
- c. Karena anak berada di bawah pengampunan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.

Kedua dari harta peninggalan suaminya, apabila janda tidak mendapat bagian, janda berhak mendapat nafkah seterusnya, sehingga untuk keperluan itu kadang-kadang harta peninggalan dibiarkan padanya tidak dibagi-bagi, termasuk juga barang asal suaminya. Harta peninggalan boleh ddibagi-bagi asalkan kehidupan si janda terpelihara, misalnya janda telah mendapat penghibahan pada waktu suaminya masih hidup atau nafkahnya dijamin oleh seorang atau beberapa ahli waris, atau mungkin saja janda telah diberi bagian yang layak dari harta peninggalan suaminya untuk nafkahnya atau mungkin janda itu kawin lagi dengan orang lain, sehingga nafkahnya tidak perlu lagi dijamin dari harta peninggalan suaminya yang meninggal.

Janda selalu mendapat bagian waris bersama-sama dengan ahli waris yang lain-lain. Ia tidak menutup hak waris lainnya, sebaliknya ia tidak ditutup

kemungkinannya mendapat bagian warisan oleh ahli waris lainnya. Orang tua yang masih hidup berhak atas nafkah yang diambilkan dari harta peninggalan si suami. Dan apabila terdapat anak-anak, maka menurut hukum adat Jawa, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta kekeluargaan antara semua anak, asalkan saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.

Kedudukan janda seperti yang diuraikan diatas, selalu yang dimaksudkan ialah janda yang telah lama hidup bersama dalam perkawinan dengan almarhum suaminya. Tetapi apabila seorang perempuan belum lama kawin, belum mempunyai anak, bahkan belum lagi ada barang *gono-gini* dan suaminya meninggal dunia, maka barang asal suaminya pulanb kembali pada keluarganya sendiri. Apabila perkawinan masih belum lama disusul dengan meninggalnya suami, maka boleh dianggap pembentukan rumah tangga masih belum terjadi bulat. Janda muda kembali ke rumah orang tuanya dan akan kawin lagi apabila masanya datang. Dalam hal demikian ini, janda tidak dapat menahan pulang kembali suaminya kepada familynya.

Mengingat akan kedudukan janda yang bersifat khusus dan istimewa, menurut hukum adat Jawa, seorang janda dari seorang laki-laki yang meninggal dunia mendapat perhatian sepenuhnya. Dalam memandang kedudukan janda ini, hukum adat Jawa tidak membatasi kriteria ahli waris itu hanya persamaan darah saja, melainkan melihat juga kenyataan bahwa pada umumnya dalam suatu perkawinan itu hubungan lahir dan batin antara suami dan isteri dapat dikatakan

sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara suami dan para keluarga sedarah. Kenyataan adanya hubungan yang sangat erat itu menimbulkan suatu rasa keadilan yang perihal warisan, si peninggal warisan harus memberi kepada janda perempuan suatu kedudukan yang pantas disamping kedudukan anak-anak keturunan si peninggal warisan.

Mengenai seorang janda menurut hukum adat di seluruh Indonesia dalam hubungannya dengan warisan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai janda meninggal dunia atau kawin lagi, sedangkan di beberapa daerah Indonesia disamping penentuam ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan.

Berdasarkan urain di atas, dapat dilihat kasus mengenai hak janda kedua sebagai ahli waris, kasus tersebut sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.V/2001/PN.Sukoharjo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Menimbang, bahwa pihak ahli waris melalui kuasanya telah mengajukan perlawanan secara tertulis tertanggal 3 April 2001 dan telah mengemukakan dalil-dalil perlawanan yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Pak NARNO SEMITO alias TUWUH yang bertempat tinggal di Ngombak Kalang Desa Wirung, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, telah mempunyai dua orang istri yang bernama : istri pertamanya bernama : NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM; dan istri keduanya bernama : NY. NARNO SEMITO alias SEMI;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan istri pertama yang bernama NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa atas ijin dan perkenaan dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM maka Pak NARNO SEMITO alias TUWUH menikah lagi dengan NY. NARNO SEMITO alias SUMI sebagai istri yang kedua sebagaimana dalam kutipan dan dengan istri yang kedua tersebut telah dikarunia tiga orang anak dan merupakan ahli waris anak kandung yang sah yaitu sebagai berikut :
 - 1) JOKO SUMPENO, Laki-laki, Tanggal lahir : 11 Desember 1977;
 - 2) ENDANG SUMIYATUN; Perempuan, Tanggal lahir 2 Agustus 1979;
 - 3) ROCHANY NINGSIH; Perempuan; Tanggal lahir; 15 Mei 1986
- Bahwa ijin untuk menikah lagi tersebut diberikan atas kesepakatan dan janji bahwa apabila dikemudian hari telah dilahirkan seorang anak keturunan dari istri kedua tersebut maka anak pertama harus dipelihara dan diasuh serta akan dijadikan anak angkat oleh NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM sebagai ahli warisnya kelak;
- Bahwa Pak NARNO SEMITO alias TUWUH telah meninggal dunia di Ngombak Kalang Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo pada Hari Rabu Wage 29 Juli 1992 sebagaimana tersebut dalam surat kematian.
- Bahwa setelah meninggal, Pak NARNO SEMITO alias TUWUH selain meninggalkan ahli waris (istri dan anak-anak kandung) juga meninggalkan beberapa harta warisan yang berupa barang tidak bergerak yaitu berupa :

- 1) Tanah sawah sebagaimana tersebut dalam leter C No. 630/46 c-240-III-S, seluas 5.440 M² Sertipikat Hak Milik No. 1226, SU No. 4648/1986 tertanggal 1 Juli 1986 atas nama Pak NARNO SEMITO Alias TUWUH yang terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Barat : Sawah milik Somo
Selatan : Saluran Irigasi air
Timur : Sawah milik NARNO SEMITO

- 2) Tanah sawah sebagaimana terdaftar dalam leter C No. 584 Seb/37.147.II S, seluas 5.470 M² Sertipikat Hak Milik No, 375 GS No. 8284/1974 tertanggal 29 Nopember 1974 atas nama Pak NARNO SEMITO alias TUWUH yang terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah milik Irodikromo
Barat : Rel ban
Selatan : Sawah milik Harjo Sudiro
Timur : Saluran irigasi air

- 3) Tanah sawah sebagaimana terdaftar dalam leter C No. 232 Persil 46c 241-S-III, seluas 5.240 M² Sertipikat Hak Milik No. 27 atas nama Pak NARNO SEMITO alias TUWUH yang terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Barat : Tanah No. M. 1226
Selatan : Saluran irigasi air
Timur : Tanah No. M. 1227

- 4) Tanah perkarangan sebagaimana terdaftar dalam leter C 1160. SU. No. 4649/1986 tertanggal 1 Juli 1986 atas nama Pak NARNO SEMITO alias

TUWUH yang terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perkarangan milik Suratin
 Barat : Perkarangan milik Hartono Suharjo
 Selatan : Jalan
 Timur : Perkarangan milik Endang Sri Amiyati

- 5) Tanah perkarangan sebagaimana terdaftar dalam leter C 245/86-III.P. seluas 342 M2 Sertipikat Hak Milik No. 1433 atas nama ENDANG SUMIYATUN yang terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai
 Barat : Perkarangan milik NY. SUATARTI HM. 1432
 Selatan : Jalan
 Timur : Perkarangan milik Siswa Suharjo

Adapun keberadaan dan buku Sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah telah dikuasai oleh para TERLAWAN.

- Bahwa keseluruhan tanah-tanah milik dan atas nama Pak NARNO SEMITO alias TUWUH tersebut adalah asal persil Konversi tanah hak hanggaduh turun temurun yaitu tanah sanggan sehingga status dan kedudukan serta hak tanah tersebut diatur dalam ketentuan hukum dalam Ryksblad Surakarta tahun 1983, sehingga dengan demikian, karena atas tanah tersebut adalah atas nama dan milik pak NARNO SEMITO alias TUWUH dan apabila telah meninggal dunia maka haruslah mutlak menjadi hak secara turun temurun jatuh kepada ahli waris yang sah (anak kandung).
- Bahwa selanjutnya antara NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM dengan NY. NARNO SEMITO alias SUMI telah saling gugat menggugat yang mana perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 26/Pdt./G./1994/PN.Sukoharjo. Jo 341 Pdt./1995/PT. Smg.

Jo538/K.Pdt./1996 dan saat ini telah dimohon dan dieksekusi dengan Nomor : 03/Pdt./Eks./2001;

- Bahwa atas perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan benar putusan yang berbunyi bahwa tanah sawah yang tercantum dalam hak milik No. 1226, tanah perkarangan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang tercantum dalam sertifikat hak milik No. 1160, tanah sawah yang tercantum dalam hak milik No. 375 yang kesemuanya terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo adalah merupakan harta gono-gini milik NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM dan secara keseluruhan merupakan hak kepunyaan NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat No. 1433 di Desa Wirun atas nama ENDANG SUMIYATUN adalah merupakan harta gono-bini almarhum Pak NARNO SEMITO alias TUWUHyang berhak atas harta gawan tersebut adalah janda-janda selama hidupnya dan tidak kawin lagi, dan tiga orang anaknya yaitu JOKO SUMPENO; ENDANG SUMIYATUN; ROCHANI NINGSIH masing-masing berhak menerima 1/5 bagian dari harta tersebut;-----
- Bahwa sebelum turunnya putusan tersebut diatas NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM telah meninggal dunia pada hari Selasa Pon 18 Januari 2000 sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3/4/1/2000 di Ngambak Kalang Rt. 02 Rw II Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang mana dengan meninggalnya NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM tidak mempunyai keturunan anak kandung kecuali meninggalkan dan mempunyai anak angkat JOKO SUMPENO sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959, No. 37/K/Sip/1959, bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya;-----

- Bahwa setelah kematian NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM tersebut atas hak-haknya berdasarkan keputusan tersebut telah dimohonkan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo oleh orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris untuk mengaambil hak-hak milik NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM yang nota bena adalah para terlawan;-----
- Bahwa keberadaan para pemohon eksekusi yang nota bena dalam hal ini adalah para terlawan adalah bukan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, sehingga apabila para terlawan memohonkan suatu eksekusi atas pelaksanaan putusan Pengadilan, Srihastuti (yang diperankan SERTU HARMANTO) sementara para terlawan bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM maupun dengan demikian permohonan eksekusi oleh para terlawan adalah cacat menurut hukum dan tidak sah maka berakibat eksekusi tersebut tidak dilaksanakan dan batal demi hukum karena tidak sah sehingga dengan demikian eksekusi tersebut harus dibatalkan, karena berdasarkan ketentuan hukum sudah jelas bahwa terdapat anak kandung yang berhak sebagai satu-satunya ahli waris yang dapat mewarisi atas peninggalan pewarisnya, selain daripada itu berdasarkan Ryksblaad Surakarta tahun 1938 harta-harta tersebut asal konversinya adalah hanggaduh turun temurun yaitu tanah sanggan, sehingga sudah semestinya atas tanah tersebut berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Ryksblaad tahun 1938 dan jatuh kepada anaknya;-----
- Bahwa padahal JOKO SUMPENO adalah sebagai ahli waris anak kandung dan juga ahli waris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum adat sebagai anak angkat dari almarhum NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM dan juga adalah sebagai penerima wasiat dari almarhum sebagaimana telah tersebut dalam Akta Surat Wasiat No. 4 tertanggal 26 Maret 1988 dibuat PURNAMANINGRUM, SH, Pejabat Notaris/PPAT di Sukoharjo, PPAT yang mana dalam Surat Wasiat tersebut berisikan bahwa

JOKO SUMPENO telah diangkat sebagai ahli waris dari sebagian harta peninggalan Pak NARNO SEMITO alias TUWUH, yaitu atas harta milik saya berupa tanah perkarangan dengan hak milik 1.160 seluas 1.100 M2 atas nama NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM dalam surat ukur nomor 4.649/1986 tertanggal 1 Juli 1986 yang terletak di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo serta tanah sawah hak milik No. 375 seluas 5.470 M2 GS. No. 8284/1974 tertanggal 29 Nopember 1974 yang terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;-----

- Bahwa selain sebagai penerima wasiat, JOKO SUMPEMO adalah sebagai ahli waris dan juga sebagai anak angkat yang berhak atas peninggalan harta-harta dari almarhum NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM sebagai orang tua angkatnya dan juga sebagai ahli waris anak kandung almarhum Pak NARNO SEMITO alias TUWUH yaang berhak atas harta ayah kandungnyaa atas harta hanggaduh turun temurun yaaitu tanah sanggagawe sebagai kuli kenceng (Ryksblaad Surakarta tahun 1938) setelah daripada ahli waris anak kandung yang lain yaitu ENDANG SUMIYATUN dan ROCHANI NINGSIH serta janda NY. NARNO SEMITO alias SUMI;-----
- Bahwa dengan demikian atas tanah-tanah tersebut keseluruhannya sudah seharusnya jatuh dan mutlak menjadi milik para ahli waris yang sah yaitu para pelawan karena tidak ada ahli waris yang lain selain para pelawan;-----
- Bahwa atas obyek sengketa dikhawatirkan akan dialihkan oleh pihak para terlawan maka sudah semestinya atas obyek sebagaimana tersebut dalam posita angka 07 untuk dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag----
- Bahwa karena para pelawan telah didukung dan terdapat bukti-bukti yang kuat dan akurat maka sudah semestinya dalam perkara ini putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya-upaya hukum yang lain;---

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Possita diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo

untuk menerima, memeriksa dan sekaligus memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

01. Menerima dan mengabulkan perlawanan ini untuk seluruhnya-----
02. Menyatakan para pelawan (ahli waris) adalah pelawan yang baik
03. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga menurut hukum akta wasiat No. 4 tertanggal 25 Maret 1938 dengan segala akibat hukumnya-----
04. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa para pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak NARNO SEMITO alias TUWUH-----
05. Menyatakan bahwa para terlawan bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM yang tidak berhak mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara No. 03/Pdt/Es/2001 Jo. 538/K/Pdt/1996 Jo. 341/Pdt/1995/PT. Smg. Jo 26/Pdt/G/1994/PN. Sukoharjo.
06. Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 03/Pdt/Eks/2001 Jo. 538/K/Pdt/1996 Jo. 341/Pdt/1995/PT. Smg. Jo 26/Pdt/G/1994/PN. Sukoharjo dengan segala akibat hukumannya-----
07. Menetapkan bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka 07 adalah barang bawaan (harta bawaan) almarhum Pak NARNO SEMITO alias TUWUH yang mutlak menjadi milik dan hak para pelawan dengan segala akibat hukumnya-----
08. Menetapkan obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik dari para pelawan-----
09. Menghukum kepada para terlawan atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para pelawan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan beban apapun-----
10. Menghukum kepada para terlawan untuk seketika dan sekaligus menyerahkan sertifikat atas tanah tersebut tanpa suatu beban dan kompensasi apapun-----

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek-obyek sengketa tersebut diatas-----
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yaang lain-----
13. Membebaskan kepada para terlawan untuk membayar biaya-biaaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2001 dan 30 April 2001, pihak II (terlawan) telah mengajukan eksepsi, jawaban mapun gugat rekompensi pada kuasa hukumnya. Pertama para terlawan atas perlawanan eksekusi perkara Perdata Nomor : 03/Pdt.Eks/2001 Jo 538/K/Pdt./1996 Jo.341/Pdt/1995/PT. Smg. Jo 26/Pdt/G/1994/PN Sukoharjo. Yang diajukan oleh para pelawan dalam perkara perdata nomor : 22/Pdt.V/2001/PN. Sukoharjo. Sebagai berikut :

1. Perlawanan para pelawan atas eksekusi perkara Nomor : 03/Pdt.Eks/2001 Jo 538/K/Pdt./1996 Jo.341/Pdt/1995/PT. Smg. Jo 26/Pdt/G/1994/PN Sukoharjo. Yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2001 dibuat secara tidak jelas dan kabur serta habis in idem mengenai materi perkaranya.
2. Ketidakjelasan perlawanan tersebut, karena eksekusi terhadap perkara tersebut telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang mengatur bahwa apabila ada orang yang sedang berpekara meninggal dunia sebelum isi putusan yaang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan, maka ahli warisnya berhak untuk meneruskan dan mengajukan eksekusi atas perkara tersebut. Para terlawan dalam perkara ini

berkedudukan sebagai ahli waris dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM yang sah, berhak mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara perdata tersebut, sehingga para pelawan di dalam mengajukan perlawanan eksekusi tidak jelas dasar hukumnya.

3. Materi perkara perlawanan ini adalah sama dengan materi perkara terdahulu yang telah dilaksanakan eksekusi, yaitu tentang pembagian warisan/harta atas nama Pak NARNO SEMITO alias TUWUH, antara pelawan sebagai penggugat/tergugat rekonpensi dan NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM sebagai tergugat/penggugat rekonpensi, maka ditentukan dengan tegas dan jelas yang menjadi hak para pelawan dan hak NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM atas tanah-tanah dan bangunan sengketa, sedangkan para terlawan dalam perkara ini adalah ahli waris yang sah dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM (saudara kandung dan anak-anak saudara kandung dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM) sehingga perlawanan ini diajukan secara habis in idem.²¹⁾

Berdasarkan putusan di atas, kedudukan NY. Narno Semito alias Sumi sebagai isteri kedua secara hukum merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Narno Semito alias Tuwuh. Putusan Pengadilan itu sesuai dengan kenyataan bahwa hukum adat Jawa menghargai bahwa di lingkungan masyarakat Jawa janda akan mendapat harta warisan suami selama hidupnya atau mengalihkannya.

²¹⁾ Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tanggal 25 Juli 2003

kepada anak-anaknya setelah mereka berdiri sendiri. Bahkan adakalanya janda dalam menguasai harta warisan berperan sebagai pembagi harta warisan itu kepada para waris tanpa adanya campur tangan saudara-saudara lelaki almarhum suami. Kecuali apabila si-janda tidak mempunyai keturunan dan tidak pula mempunyai anak angkat maka timbul persoalan bagaimana harta warisan itu dibagi kepada para waris pengganti.

B. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Kewarisan

Dalam susunan masyarakat modern yang telah bergemilang dalam percaturan ekonomi yang luas ada kemungkinan semasa hidupnya pewaris adalah penguasaan yang banyak terlibat dengan hutang piutang yang banyak. Dalam hal ini memang perlu para waris dilindungi, agar jangan hendaknya para waris yang tidak tahu menahu kesalahan orang tua menanggung beban yang berat sehingga kehidupan para waris menjadi ikut menderita kerugian. Perlindungan terhadap para waris demikian dapat diterima, sepanjang masalahnya tidak bertentangan dengan asas-asas pewarisan berdasar peraturanperundangan atau hukum adat yang memerlukan adanya penelitian dan pertimbangan terhadap latar belakang kedudukan pewaris, harta warisan dan peri kehidupan para waris yang ditinggal.

Dengan demikian dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan kewarisan khususnya masalah kedudukan isteri kedua dalam hukum waris adat Jawa. Penelitian ini mengkaji kedudukan isteri kedua dalam

hukum waris adat sebagai putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 22/Pdt.V/2001/PN.SKH, dengan menimbang fakta-fakta sebagai berikut :

1. Alasan para pelawan yang diajukan dalam rekompensi ternyata dalil-dalilnya kabur (*obscur libed*), terlihat dari materi perlawanannya yang sebagian besar merupakan pengulangan dari materi perkara yang terdahulu yang telah dieksekusi pada tanggal 21 Maret 2001. Rumusan tentang harta gawan dan harta gana-gini dan rumusan tentang adanya surat wasiat dari NARNO SEMITO alias TUWUH kepada JOKO SUMPENO dan rumusan tentang anak-anak serta istri-istri Narno Semito alias Tuwuh, telah dibahas tuntas dalam pertimbangan hukum perkara terdahulu yang telah dieksekusi, sehingga apabila hal-hal tersebut dijadikan sebagai dasar hukum atau materi dalam perkara perlawanan ini maka sangatlah tidak tepat dan kabur. Tentang rumusan JOKO SUMPENO (Pelawan II) anak kandung NY. NARNO SEMITO alias SUMI (Pelawan I) yang dalam perlawanan ini dirumuskan ulang sebagai anak angkat NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM (Istri tua NARNO SEMITO alias TUWUH) hanyalah rekayasa ulang para pelawan, yang sejak semula beritikad buruk ingin merampas hak-hak NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM, yang dalam perkara terdahulu digugat oleh para pelawan.
2. Materi perkara perlawanan ini adalah sama dengan materi perkara terdahulu yang telah dilaksanakan eksekusi, yaitu tentang pembagian warisan/harta atas

nama NARNO SEMITO alias TUWUH, antara para pelawan sebagai penggugat/tergugat rekopensi dan NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM sebagai tergugat/penggugat rekopensi, sedangkan dalam perkara perdata No. 538 K/Pdt./1996 telah ditentukan dengan tegas dan jelas mana yang menjadi hak para pelawan dan mana yang menjadi hak NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM atas tanah-tanah para terlawan dalam perkara ini adalah ahli waris yang sah dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM (saudara kandung dan anak-anak saudara kandung dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM) sehingga perlawanan ini diajukan bersifat *nebis in idem*.

3. Bahwa para pihak tidak menerima karena pelawan II (JOKO SEMPENO) anak kandung NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM tidak dapat diterima pengangkatannya sebagai anak angkat NY. NARNO SEMITO alias SUMI (istri pertama NARNO SEMITO alias TUWUH), hal ini disebabkan adanya rekayasa ulang berdasar Surat Keterangan Waris Nomor 03/Pdt.Eks/2001/PN.SKH, tertanggal 2 Januari 2001, sehingga tidak berhak mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara perdata tersebut yang tidak jelas dasar hukumnya.
4. Para pihak telah dengan tegas dan jelas menerima hak para pelawan dan hak NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM atas tanah dan bangunan yang disengketakan ²²⁾.

²²⁾ Hasil wawancara dengan para pihak dalam perkara gugatan, alasan para pihak tidak menerima gugatan tersebut. Tanggal 23 Juli 2003.

5. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa para pelawan dengan dalil yang mereka ajukan bahwa Joko Sumpeno sebagai anak kandung dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM (Istri kedua almarhum Pak Narno Semito alias Tuwuh), dijadikan sebagai dasar hukum atau materi dalam perkara perlawanan tidak tepat atau kabur, karena pengangkatan sebagai anak angkat yang berhak atas harta sengketa dari almarhumah NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM (isteri tua) setelah NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM (isteri tua) meninggal dunia. Logika formal yang menggugurkan dalil bahwa Joko Sumpeno diangkat menjadi anak angkat NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM. Namun fakta ini baru muncul dalam gugatan rekonsensi, sehingga hakim berpendapat bahwa keberadaan anak angkat itu rekayasa belaka.
6. Perkara tersebut telah diputuskan sampai pada tingkat Mahkamah Agung dengan Amar putusan bahwa janda-janda almarhum NARNO SEMITO selama hidupnya dan tidak kawin lagi dan tiga orang anaknya yaitu JOKO SUMPENO, ENDANG SUMIYATUN dan ROCHANININGSIH, masing-masing berhak menerima $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian dari harta asal peninggalan almarhum NARNO SEMITO²³⁾.

Hal tersebut telah diputuskan dalam pertimbangan hukum ketiga tingkatan Badan Peradilan dengan kata lain mengenai hal yang didalilkan oleh para

²³⁾ Hasil wawancara dengan hakim, Tanggal 23 Juli 2003.

pelawan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Bukti T.1 sampai dengan T.3) sehingga dengan demikian apabila para pelawan jika merasa mempunyai sesuatu hak yang timbul dari Pak Narno Semito alias Tuwuh seharusnya mengajukan suatu gugatan baru.

1. Menurut Hakim dalam gugat balik dari penggugat rekonsensi/terlawan bahwa terhadap harta sengketa dalam perkara perlawanan ini No. 22/Pdt./V/2001/PN.Skh telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Menurut Hakim, karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para terlawan/penggugat rekonsensi sebagai para ahli waris dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM (Istri pertama pak NARNO Semito alias TUWUH) telah mengajukan eksekusi, sebab NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diterima oleh kuasanya yaitu Djoko Susanto, PH, SH.
3. Menurut Hakim, berdasarkan bukti T.5 dan T.6 bahwa NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM telah meninggal dunia karena sakit itu pada tanggal 18 Januari 2000, dan oleh para ahli waris dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM (para terlawan/penggugat rekonsensi) telah diajukan permohonan eksekusi yang didasarkan pada keterangan ahli waris T.6 dan T.8 serta keterangan para saksi yaitu Trisno Suwarni dan Winardi yang mereka mengetahui bahwa para terlawan/penggugat rekonsensi adalah sebagai ahli waris dari NY. NARNO SEMITO alias SUMIYEM almarhum.

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan tesis ini, penulis menarik beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta memberikan saran-saran yang diharapkan akan dapat memberikan masukan atau informasi berharga bagi penelitian yang akan datang. Adapun kesimpulan penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kedudukan janda dalam proses pewarisan menurut hukum adat di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo kedudukan isteri kedua secara hukum merupakan salah satu ahli waris yang sah dari pewaris. Di lingkungan masyarakat Jawa janda akan mendapat harta warisan suami selama hidupnya atau mengalihkannya kepada anak-anaknya setelah mereka berdiri sendiri. Bahkan adakalanya janda dalam menguasai harta warisan berperan sebagai pembagi harta warisan itu kepada para waris tanpa adanya campur tangan saudara-saudara lelaki almarhum suami.
2. Faktor yang berpengaruh dalam penerapan kewarisan adanya fakta-fakta bahwa pada masyarakat adat yang menarik garis kekeluargaan (yang bersistem parental maupun bilateral) bahwa janda adalah ahli waris terhadap barang percaharian bersama (gono gini) sedang untuk harta asal almarhum suaminya, janda berhak tetap pada kekuasaannya untuk dinikmati sampai janda itu meninggal dunia atau kawin lagi. Janda bukan ahli waris almarhum

suaminya, artinya tidak mewaris dari harta asal atau harta bawaan almarhum suaminya, tetapi dia berhak atas bagian dari harta pencaharian bersama (gono-gini). Janda tanpa anak dapat menguasai harta gono-gini sepenuhnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.

B. Saran-saran

1. Dalam hal pewarisan berdasar hukum adat, maka bagi masyarakat Jawa berlaku hukum adat Jawa. Namun konsekuensinya harus ditunjuk "juru bagi" yang benar-benar adil, sehingga tidak ada yang dirugikan bagi masing-masing pewaris. Oleh karena itu sebaiknya lembaga peradilan juga membentuk "lembaga juru bagi" dalam pelaksanaan hukum adat.
2. Dalam hal terjadi permasalahan dalam rangka mencapai pembagian harta warisan secara hukum adat, sebaiknya pihak lembaga pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon pewarisan menurut hukum adat. Sehingga meskipun yang diberlakukan hukum adat, masyarakat pengguna hukum adat benar-benar merasa terlindungi dan merasa mendapatkan kepastian hukum.
3. Apabila terdapat permasalahan dalam hal kesulitan mencapai keadilan dalam pembagian warisan berdasar hukum adat, apabila sampai di lembaga Peradilan, maka kepada pemohon keadilan perlu disarankan untuk menggunakan dasar hukum perdata ataupun dasar hukum berdasar kesepakatan para ahliwaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, 1985.
- Fahrudin, Fuad Mohd, *Masalah Warisan Anak Dalam Hukum Islam*, Penerbit CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1985.
- Harsojo, *Kumpulan Peraturan Perundangan : Tentang Pertanahan*, Aneka, Jakarta, 1991.
- Hadikusuma, Hilman, Soedarsono, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni Bandung, 1980.
- Hadikusuma, Hilman, *Ensiklopedia Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.
- Rusli, *Hukum Perkawinan Islam dan Peraturan Pelaksananya*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Salyo, Suwarni, *Kedudukan Wanita Sebagai Ahli Waris dan Pewaris*, Penerbit BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Sasroadmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Liberty Press, Yogyakarta, 1985.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermesa, Jakarta, 1980.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

Subekti, Tamara J., *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sugangga I.G.N., *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit : Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Prakoso, Djoko, I Ketut Mustika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1984.

Poerwodarminto. WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967.